
**PERLAWANAN MASYARAKAT KOTO NAN GADANG TERHADAP AGRESI
MILITER BELANDA II TAHUN 1948-1949**

Salsabila Dwi Putri¹, Erman², Erasiah³

^{1,2,3}UIN Imam Bonjol Padang

Email: sbiladwip11@gmail.com¹, erman@uinib.ac.id², erasiah@uinib.ac.id³

Abstrak: Perlawanan masyarakat adalah bentuk ekspresi masyarakat atas ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Salah satunya perlawanan masyarakat yakni perlawanan yang dilakukan masyarakat Koto Nan Gadang terhadap Agresi Militer Belanda II. Agresi Militer Belanda II yang terjadi pada tahun 1948-1949 ini membuat masyarakat dalam kondisi kesulitan. Penelitian ini akan menjelaskan tentang latarbelakang timbulnya perlawanan masyarakat, bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat, organisasi selama perlawanan dan dampak yang ditimbulkan dari perlawanan yang dilakukan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang dapat menjelaskan bagaimana perlawanan tersebut terjadi setelah melalui tahapan-tahapan penelitian. Teori yang digunakan adalah teori gerakan sosial-perlawanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlawanan terjadi karena keresahan dan ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat di tanah mereka sendiri. Perlawanan yang dilakukan berupa kontak fisik melalui organisasi-organisasi yang ada. Perlawanan ini memiliki dampak yang cukup serius, dimana banyak masyarakat yang kehilangan rumah, tanah bahkan jiwa. hal ini menarik diteliti untuk melihat kontribusi masyarakat lokal yang berpengaruh pada masa itu.

Kata Kunci: Agresi Militer II, Koto Nan Gadang (Payakumbuh), Perlawanan Masyarakat, PDRI.

Abstract: Community resistance serves as a form of public expression against the injustices experienced in people's lives. One such instance is the resistance mounted by the people of Koto Nan Gadang against the Second Dutch Military Aggression. This aggression, which took place between 1948 and 1949, plunged the community into a state of hardship. This study examines the background of the resistance, the forms it took, the organizational structures involved, and the resulting impacts. The research employs the historical method to reconstruct the events of the resistance through systematic research stages, utilizing social movement and resistance theory as its analytical framework. The findings indicate that the resistance arose from the unrest and unease felt by the community on their own land. The resistance involved physical confrontation carried out through existing organizations and had severe consequences, with many residents losing their homes, land, and even their lives. This topic warrants study to highlight the significant contributions made by the local community during that era.

Keywords: Second Military Aggression, Koto Nan Gadang (Payakumbuh), Community Resistance, PDRI.

PENDAHULUAN

Perlawanan masyarakat merupakan salah satu bentuk gerakan sosial yang muncul sebagai respons terhadap kondisi kehidupan yang dianggap tidak adil atau mengancam keberlangsungan masyarakat. Dalam sejarah Indonesia, perlawanan terhadap kekuasaan asing telah berlangsung dalam berbagai bentuk, baik secara fisik maupun nonfisik. Salah satu momentum yang memperlihatkan kuatnya keterlibatan masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan adalah Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948-1949. Agresi tersebut tidak hanya menjadi persoalan anatar pemerintah Republik Indonesia dan Belanda, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Ketika Belanda berupaya menguasai kembali wilayah Indonesia, masyarakat turut mengambil peran dalam mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai bentuk perlawanan. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan oleh institusi Negara, organisasi politik, atau kelompok militer, tetapi juga oleh masyarakat di tingkat lokal. Dalam konteks ini, perlawanan masyarakat dapat dipahami sebagai respons terhadap dominasi kekuasaan yang mengancam kedaulatan sekaligus mengganggu kehidupan sosial masyarakat yang dijelaskan oleh James C. Scott. Hal tersebut sesuai juga dengan pemikiran Michel Foucault mengenai *bopower*, yaitu kekuasaan yang berupaya mengatur dan mengendalikan wilayah, populasi, serta kehidupan masyarakat (Marista Chirtina Shally Kabelen). Dalam situasi Agresi Militer Belanda II, upaya Belanda untuk menguasai dan mengendalikan masyarakat menjadi salah satu kondisi yang mendorong munculnya berbagai bentuk perlawanan lokal.

Bagi masyarakat Indonesia, kembalinya Belanda ke Indonesia setelah kemerdekaan dan dilancarkan Agresi Militer merupakan kondisi yang mengancam kehidupan masyarakat. Kehadiran Belanda tidak hanya bertujuan untuk menguasai kembali wilayah Indonesia, tetapi juga menimbulkan berbagai tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang menolak mengikuti kehendak mereka serta membatasi kebebasan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Madora, 2019). Diantara berbagai agresi yang dilakukan Belanda, Agresi Militer Belanda II menjadi salah satu fase yang memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan Republik Indonesia. Pada masa tersebut, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan dan menangkap sejumlah pemimpin Republik Indonesia. Kondisi ini menyebabkan pemerintahan Republik Indonesia berada dalam keadaan tidak stabil, sementara

penguasaan sejumlah wilayah oleh Belanda turut mengganggu tatanan pemerintahan dan mempertaruhkan keberlangsungan kedaulatan Republik Indonesia (Djaja, 2018, p. 8). Keadaan tersebut segera direspon oleh Presiden dan para pemimpin Republik Indonesia melalui upaya mempertahankan keberlangsungan pemerintahan dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda.

Pembentukan Pemerintahan Darurat di Sumatera Barat sebagai bentuk mempertahankan pemerintahan di bawah kepemimpinan oleh Sjafruddin Prawiranegara. Keberadaan PDRI menjadi penting karena pemerintahan Republik Indonesia tetap dapat menjalankan fungsi politik dan pemerintahan meskipun pusat pemerintahan di Jawa telah dikuasai Belanda. Mestika Zed melalui kajiannya berjudul *"Somewhere in the Juggle"* menjelaskan bahwa pemerintahan darurat menjalankan strategi gerilya dengan ber[indah dari satu tempat ke tempat lain untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan dan mempertahankan eksistensi Republik Indonesia (Zed, 1997). Dalam proses tersebut, keberadaan masyarakat lokal menjadi bagian penting karena pemerintahan darurat tidak dapat dipisahkan dari dukungan sosial, logistic, informasi, dan keamanan yang diberikan oleh masyarakat di wilayah yang menjadi basis perjuangan. Sudiyo (2020) *"Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Dari Budi Utomo Sampai Dengan Pengakuan Kedaulatan"* juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal memiliki arti penting dalam mempertahankan perjuangan kemerdekaan, baik bagi keberlangsungan pemerintahan maupun bagi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Salah satu kelompok masyarakat yang terlibat dalam perjuangan tersebut adalah masyarakat Nagari Koto Nan Gadang, khusus para pemuda. Nagari Koto Nan Gadang memiliki posisi penting karena berada di wilayah Payakumbuh yang pada masa Agresi Militer Belanda II menjadi salah satu wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Kehadiran Belanda di Payakumbuh menimbulkan situasi yang tidak aman bagi masyarakat dan mendorong munculnya perlawanan ersenjata. Para pemuda Koto Nan Gadang tidak hanya menjadi pihak yang terdampak konflik, tetapi juga secara aktif terlibat dalam perjuangan melalui kegiatan gerilya dan kontak fisik dengan pasukan Belanda. Keterlibatan tersebut tercatat dalam manuskrip Mardisun yang berjudul *"Peristiwa/Sejarah Pemuda Gerilya Antara Koto Nan Gadang Payakumbuh di Pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)"* (Mardisun, 1995). Catatan tersebut memberikan gambaran mengenai aktivitas pemuda Koto Nan Gadang dalam menghadapi

Belanda serta hubungan perjuangan masyarakat lokal dengan keberadaan PDRI di Sumatera Barat. Meskipun demikian, kajian mengenai PDRI dan Agresi Militer Belanda II selama ini lebih banyak memberikan perhatian pada aspek politik dan militer dalam skalanasional maupun regional. Peran msyarakat di tingkat nagari, khususnya proses munculnya perlawanan, bentuk-bentuk perlawanan, serta dampak di tingkat lokal masih perlu dikaji secara lebih mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab persoalan mengenai latarbelakang munculnya perlawanan masyarakat Nagari Koto Nan Gadang terhadap Belanda, bagaimana bentuk dan strategi perlawanan yang dilakukan, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perlawanan yang dilakukan masyarakat Nagari Koto Nan Gadang. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan sejarah dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai focus analisis. Sumber utama berupa manuskrip, catatan sejarah/arsip, wawancara dan buku-buku yang berkaitan dengan PDRI. Pendekatan ini digunakan untuk merekontruksi peristiwa sejarah kronologis sekaligus memahami alasan masyarakat memilih untuk melakukan perlawanan, bentuk keterlibatan merea dan kondisi sosial yang mlatarbelakangi tindakan tersebut. Dengan demikian, perlawanan tidak hanya dilihat sebagai rangkaian peristiwa militer, tetapi juga sebagai respon sosial masyarakat terhadap perubahan dan tekanan yang terjadi dalam kehidupan mereka.

Penelitian ini menawarkan nilai baru dengan menempatkan masyarakat Nagari Koto Nan Gadang sebagai actor sejarah yang memiliki peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan pada masa Agresi Militer Belanda II.. Fokus tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai sejarah PDRI yang selama ini cenderung berpusat pada tokoh-tokoh pemeritahan dan aktivitas militer. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan perspektif *history form below*, yaitu penulisan sejarah yang memberikan ruang lebih besar kepada pengalaman dan tindakan masyarakat biasa sebagai bagian dari proses sejarah. Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya memperkaya historiografi mengenai Agresi Militer Belanda II dan PDRI, tetapi juga memberikan gambaran mengenai hubungan antara perlawanan masyarakat lokal dan perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia di tingkat nagari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan perlawanan masyarakat Koto Nan Gadang terhadap Agresi Militer Belanda II. Sumber yang digunakan meliputi sumber primer, sumber sekunder, dan sumber lisan. Sumber primer berupa manuskrip berdasarkan cerita tokoh pejuang Mardisun, arsip sezaman, serta surat kabar Belanda yang diperoleh melalui situs arsip digital Delpher. Sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan sumber lisan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang diteliti.

Tahap kritik sumber dilakukan untuk menguji keaslian dan kredibilitas sumber melalui kritik ekstern dan intern. Selanjutnya, tahap interpretasi dilakukan dengan menyeleksi, menghubungkan, dan menafsirkan fakta-fakta yang telah teruji untuk memperoleh rangkaian peristiwa yang kronologis dan memiliki hubungan sebab-akibat. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu menyusun hasil interpretasi ke dalam tulisan sejarah secara sistematis berdasarkan fakta dan sumber yang telah melalui tahapan penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Perlawanan Masyarakat

Koto Nan Gadang merupakan salah satu Nagari di Kota Payakumbuh. Nagari ini juga menjadi salah satu nagari tertua di Payakumbuh berdasarkan sejarah Kota Payakumbuh (Efendi, PAJACOMBO Literatur Tentang Tanah Payau, 2023, p. 3). Nagari ini terletak di persimpangan jalan raya ekonomi Sumatera Barat, Sumatera Utara dan gerbang ke provinsi Riau (Israr, 2004, p. 3). Selain itu, nagari ini juga terletak di geografis 1.452,78 Ha² dengan garis astronomi 100°20'-100°40' BT dan 0°8'-0°15' LS yang memiliki suhu rata-rata 25°-27°C (Statistik, 2024). Kondisi tersebut membuat nagari ini beriklim tropis dan menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai komoditas mata pencarian utama masyarakat.

Nagari Koto Nan Gadang menjadi salah satu wilayah yang memiliki posisi penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Payakumbuh. Sebagai nagari yang memiliki system pemerintahan adat sebelum kedatangan Belanda, Masyarakat Koto Nan Gadang memiliki ikatan sosial yang kuat berdasarkan *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi*

Kitabullah (Mardisun, 1995). Posisi Payakumbuh yang strategis sebagai jalur ekonomi yang telah dijelaskan diatas menjadikan wilayah ini penting secara ekonomi maupun militer. Pengalaman masyarakat menghadapi kolonialisme Belanda dan pendudukan Jepang sebelumnya turut membentuk kesadaran untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada masa Jepang, pemuda Koto Nan Gadang memperoleh pengalaman dasar kemiliteran melalui berbagai organisasi pemuda sehingga memiliki bekal ketika Belanda kembali melakukan agresi setelah kemerdekaan (Ishak, 2012, p. 58).

Perlawanan masyarakat muncul terutama karena rasa takut, keresahan dan ketidakamanan akibat pendudukan Belanda. Masyarakat tidak lagi merasa aman berada di rumah dan lingkungan sendiri sehingga sebagian mengungsi, sementara pemuda membentuk dan bergabung dalam pasukan gerilya. wawancara dengan Ketua KAN Koto Nan Gadang menunjukkan bahwa kedatangan Belanda menimbulkan keresahan yang mendorong masyarakat membentuk pasukan dan melakukan perjuangan secara gerilya (Yusri, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlawanan bukan semata-mata tindakan militer, tetapi juga merupakan respon masyarakat terhadap upaya penguasaan wilayah, penduduk, dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam perspektif Michel Foucault, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk peolakan terhadap praktik biopower yang berusaha mengontrol kehidupan masyarakat, kondisi tersebut menjadi modal sosial yang penting ketika menghadapi agresi militer Belanda II.

Struktur sosial nagari memungkinkan masyarakat memiliki jaringan kepemimpinan dan komunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan mobilisasi. Artinya, perlawanan tidak muncul secara tiba-tiba setelah Belanda memasuki Payakumbuh, tetapi berkembang dalam masyarakat yang sebelumnya telah memiliki pengalaman menghadapi kolonial serta memiliki ikatan sosial yang relative kuat.

Agresi Militer Belanda II yang dilancar pada tahun 1948-1949 mengubah kondisi masyarakat payakumbuh. Dengan didudukinya Payakumbuh pada 23 Desember 1948 yang sebelumnya telah melakukan serangan udara menyebabkan kepanikan dan mendorong masyarakat untuk meninggalkan rumah mereka. Kedatangan Belanda kemudian memperluas rasa takut dan ketidakpastian di tengah masyarakat (SP, 2009). Nagari Koto Nan Gadang memiliki posisi yang sangat strategis karena berada sekitar 1,3 km dari pusat kedudukan Belanda di Payakumbuh. Kondisi tersebut membuat masyarakat berada dalam situasi yang sulit: tetap

tinggal berarti menghadapi resiko pendudukan, sedangkan meninggalkan kampung berarti kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan (Mardisun, 1995).

Gerakan Perlawanan Kemudian berkembang melalui Gerilya Antara yang dipimpin Mardisun. Pemuda Koto Nan Gadang yang sebelumnya tergabung dalam BPNK menjadi bagian penting dalam gerakan tersebut. Basis pertahanan dibangun secara berpindah-pindah, antara lain di Balai Cacang, Kayu Godang Koto Tuo, dan Sawah Laweh Batu Balang. Surau, Ladang dan kawasan hutan juga dimanfaatkan sebagai tempat persembunyian, rapat dan basis operasi gerilya (Mardisun, 1995; Yusri, 2026). Dengan demikian, ruang kehidupan masyarakat berubah menjadi ruang perjuangan.

Perjuangan Koto Nan Gadang harus tetap dilakukan sampai titik akhir, walaupun harus mengorbankan kehidupan. Peristiwa yang paling sulit dihadapi oleh para pejuang yakni menghadapi ancaman yang akan dilakukan oleh Belanda jika mereka tidak menghentikan penyerangan. Hal ini berbalik dengan tujuan mereka, yang mana jika menghentikan penyerangan maka itu menandakan mereka tunduk atas Belanda. Akibat tidak menghiraukan ancaman, Belanda melancarkan serangan besar-besaran di Koto Tuo pada tanggal 10 Juni 1949 dengan membumi hangus rumah-rumah masyarakat. Walaupun tidak ada korban, karena masyarakat telah pergi mengungsi atas pemberitahuan para pemuda pejuang, namun peristiwa ini tetap menjadi peristiwa yang sangat berat bagi masyarakat (M. Reki Hidayat, 2023).

Perlawanan berakhir seiring dengan berakhirnya pendudukan Belanda di Payakumbuh. Pada 3 Desember 1949 Belanda meninggalkan Payakumbuh setelah dilakukan serah terima dengan pihak Republik Indonesia yang diwakili oleh Mayor A. Thalib dan Mardisun. Para pengungsi kemudian kembali ke daerah asal, meskipun sebagian harus menghadapi kehilangan anggota keluarga, rumah, dan sumber penghidupan (Mardisun, 1995). Pasca perang, masyarakat mulai membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomi nagari. Makam Pejuang 45 di Balai Jariang, Tugu Perjuangan Koto Nan Gadang, serta Monumen Ratapan Ibu menjadi simbol untuk mempertahankan ingatan kolektif masyarakat terhadap perjuangan dan korban Agresi Militer Belanda II. Monumen Ratapan Ibu yang menjadi Ikonik Payakumbuh menggambarkan betapa menderitanya seorang ibu/wanita atas kehilangan saudara mereka atas eksekusi yang dilakukan Belanda di jembatan tersebut (Zulfitra, 2017).

Dengan demikian, perlawanan masyarakat Koto Nan Gadang tidak dapat dipandang hanya sebagai perlawanan bersenjata. Perlawanan tersebut merupakan gerakan masyarakat

yang lahir dari pengalaman penindasan, rasa tidak aman, kesadaran mempertahankan kemerdekaan, serta kuatnya solidaritas sosial dan keagamaan. Meskipun menimbulkan kerugian besar dalam kehidupan masyarakat, perjuangan tersebut memperlihatkan kemampuan masyarakat lokal untuk mempertahankan ruang hidup dan mendukung keberlangsungan perjuangan Republik Indonesia di tengah Agresi Militer Belanda II.

2. Bentuk Perlawanan dan Organisasi Perlawanan

Bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat Koto Nan Gadang terutama berupa perang gerilya. Strategi tersebut dilakukan melalui penghadangan, sabotase, penghancuran jembatan dan jalur yang digunakan Belanda, penyerangan terhadap pos musuh, serta politik bumi hangus. Tindakan bumi hangus dilakukan untuk mencegah bangunan, gudang persenjataan, dan fasilitas penting dimanfaatkan oleh Belanda (Efendi, 2022, p. 128). Pemuda melakukan serangan pada malam hari ketika pergerakan Belanda lebih terbatas. Strategi tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan persenjataan mendorong masyarakat menggunakan mobilitas, penguasaan medan, dan dukungan masyarakat sebagai kekuatan utama. Dengan kata lain, Gerilya merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap kondisi perang sekaligus bentuk resistensi terhadap dominasi militer Belanda.

Perlawanan semakin kuat setelah berbagai tindakan kekerasan dilakukan Belanda terhadap masyarakat. Salah satu peristiwa penting terjadi pada Februari 1949 ketika tujuh pemuda Koto Nan Gadang ditangkap dan dibunuh oleh pasukan Belanda. Peristiwa tersebut kemudian mendorong semakin kuatnya semangat pemuda untuk melakukan perlawanan dan pembentukan Pasukan Mobil Teras (PMT). Pada Maret 1949, Mardisun ditetapkan sebagai pemimpin Pemerintahan Darurat Kota Payakumbuh sekaligus memiliki peran dalam perjuangan gerilya di wilayah Payakumbuh Utara (Mardisun, 1995). Peristiwa tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara gerakan masyarakat lokal dengan jaringan perjuangan PDRI. Namun, perlawanan tersebut harus dibayar dengan kerugian yang besar. Kekerasan militer menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan pejuang maupun masyarakat sipil. Peristiwa gugurnya sejumlah pemuda kemudian menjadi salah satu faktor yang memperkuat mobilisasi perjuangan dan pembentukan Pasukan Mobil Teras (PMT). Pada saat yang sama, masyarakat menghadapi pembakaran rumah, pengungsian, penangkapan, serta kehilangan anggota keluarga (SP, 2009; Mardisun, 1995).

3. Dampak

Perlawanan tersebut menimbulkan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Dalam bidang sosial, perang menyebabkan korban jiwa, pengungsian, ketakutan, dan terganggunya aktivitas sehari-hari. Berdasarkan tugu perjuangan di Koto Nan Gadang, tercatat sekitar 30 pejuang gugur, 50 warga sipil meninggal, dan sekitar 351 rumah mengalami kehancuran (SP, 2009). Namun, kondisi perang juga memperkuat solidaritas, rasa kekeluargaan, dan kerja sama masyarakat dalam membantu para pejuang.

Dalam bidang ekonomi, Pembakaran rumah dan lahan, perpindahan penduduk, serta pembatasan mobilitas menyebabkan kegiatan pertanian terganggu. Masyarakat kemudian menjalankan pola ekonomi bertahan hidup dengan melakukan produksi secara terbatas dan tersembunyi. Hasil produksi terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mendukung logistik para pejuang (Mardisun, 1995; Yusri, 2026). Arsip Mardisun mencatat sekitar 350 rumah terbakar, sedangkan sumber pada monumen lokal mencatat 371 rumah. Perbedaan angka tersebut tidak mengubah kenyataan bahwa kerusakan material yang dialami masyarakat berada dalam skala besar (Mardisun, 1995). kerusakan tersebut menunjukkan bahwa dampak perang tidak hanya bersifat material, tetapi juga mengubah struktur kehidupan masyarakat. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan bagian dari ruang sosial keluarga dan komunitas. Ketika rumah, lahan, dan sumber penghidupan dihancurkan, yang sebenarnya terganggu adalah keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, perlawanan Koto Nan Gadang dapat dipahami sebagai usaha mempertahankan keberlangsungan komunitas, bukan semata-mata mempertahankan wilayah secara militer.

Dalam bidang keagamaan, masjid dan surau tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat meskipun berada dalam pengawasan Belanda. Surau tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga digunakan sebagai tempat pertemuan dan pengambilan keputusan secara diam-diam oleh para pejuang. Nilai keagamaan turut memperkuat solidaritas masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan. Hal ini memperlihatkan kuatnya hubungan antara adat, agama, dan perjuangan masyarakat Koto Nan Gadang (Mardisun, 1995).

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlawanan masyarakat Koto Nan Gadang terhadap Agresi Militer Belanda II merupakan bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang

muncul sebagai respons terhadap pendudukan dan tekanan Belanda terhadap kehidupan masyarakat, wilayah, serta tatanan sosial nagari. Setelah Belanda menduduki Payakumbuh pada 23 Desember 1948, masyarakat terutama para pemuda melakukan perlawanan melalui strategi gerilya, seperti penghadangan, penyerangan, sabotase, pemutusan jembatan, dan politik bumi hangus. Perlawanan tersebut dilakukan secara terorganisasi melalui BPNK, PMT, dan Gerilya Antara yang dipimpin Mardisun, sehingga menunjukkan bahwa perjuangan masyarakat Koto Nan Gadang bukan sekadar perlawanan spontan, tetapi memiliki koordinasi dan keterkaitan dengan perjuangan Republik Indonesia. Perlawanan tersebut menimbulkan dampak besar berupa korban jiwa, kehancuran rumah, terganggunya kegiatan ekonomi, serta perpindahan masyarakat, tetapi pada saat yang sama memperkuat solidaritas dan rasa kekeluargaan serta membentuk memori kolektif masyarakat terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dengan demikian, perlawanan masyarakat Koto Nan Gadang tidak hanya merupakan perjuangan bersenjata melawan Belanda, tetapi juga menjadi bentuk perlawanan sosial dalam mempertahankan ruang hidup, identitas nagari, dan kemerdekaan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja, W. (2018). *PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)*. Klaten: PT Cempaka Putih.
- Efendi, F. (2022). *JEJAK YANG TERLUPAKAN Menyusuri Jejak Mr. Syafruddin Prawiranegara Dalam Menjalankan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Pada Masa Agresi Militer Kedua Belanda di Sumatera Tengah*. Payakumbuh: Fahmi Karya.
- Efendi, F. (2023). *PAJACOMBO Literatur Tentang Tanah Payau*. Kabupaten Lima Puluh Kota: Fahmi Karya.
- Ishak, M. (2012). Sistem Penjajahan Jepang di Indonesia. *Jurnal INOVASI*.
- Israr, M. H. (2004). *H. C. Israr: Kesederhanaan & Kepejuangan Anak Payakumbuh*. Bandung: Budaya Media.
- M. Reki Hidayat, E. H. (2023). Koto Tuo Lautan Api : Sebuah Peristiwa Pada Masa PDRI Di Sumatera Barat (1948-1949). *Putri Hijau : Jurnal Pendidikan Sejarah* , 220.

- Madora, S. S. (2019). Hero dan Kekerasan Pada Masa Agresi Militer Belanda I dan II (1945-1949). *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 189-200.
- Mardisun. (1995). *Peristiwa/Sejarah Pemuda Gerilya Antara Koto Nan Gadang Payakumbuh di Pusat Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)*. Payakumbuh.
- Marista Chirtina Shally Kabelen, M. P. (n.d.). *Teori Sosiologi Kontemporer*. Jawa Barat: CV Jejak.
- SP, S. (2009). *Luhak Lima Puluh Kota Basis PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)*. Kabupaten Lima Puluh Kota: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Statistik, B. P. (2024). *Kecamatan Payakumbuh Utara dalam Angka*. Payakumbuh.
- Sudiyo. (2020). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Dari Budi Utomo Sampai Dengan Pengakuan Kedaulatan*. Sejarah Pergerakan Indonesia.
- Yusri, E. (2026, April 8). Perlawanan Masyarakat Koto Nan Gadang.
- Zed, M. (1997). *Somewhere in the Juggle, Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*. Yogyakarta: PKSBE (Pusat Kajian Sosio-Budaya dan Ekonomi).
- Zulfitra. (2017). *Jembatan Ratapan Ibu*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.